

Pendekatan Studi Kebijakan Pendidikan Islam

Isyatir Radiah

Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

email: isyatirradiah03@gmail.com

Article history: Received: 19 Desember 2025; Revised: 05 Februari 2026;
Accepted: 18 April 2026; Published: 30 April 2026

Abstract

Islamic education plays a strategic role in shaping the character and civilization of the people, thus requiring comprehensive review of policies governing it. The study of Islamic education policy is not merely technical-administrative but also contains strong normative, philosophical, and social dimensions. This article aims to analyze the main approaches in the study of Islamic education policy and their relevance to the formulation and implementation of Islamic education policy in Indonesia. This study uses a qualitative approach with library research. Data were obtained from books, journal articles, and relevant policy documents, then analyzed using descriptive-analytical techniques through the stages of collection, classification, interpretation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that Islamic education policy requires an integrative approach encompassing religious, social, philosophical, epistemological, and pedagogical approaches. Public policy models also play a crucial role in bridging the ideal values of Islam with the reality of policy implementation. In conclusion, an effective Islamic education policy is one that is grounded in Islamic values, responsive to social dynamics, and capable of integrating spiritual, intellectual, and moral aspects into the educational process.

Keywords

Islamic education policy; policy approach; Islamic education; policy studies; Islamic values

Author correspondence email: isyatirradiah03@gmail.com

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/annur/index>

Copyright (c) 2026 by Isyatir Radiah



Abstrak

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan peradaban umat, sehingga kebijakan yang mengaturnya perlu dikaji secara komprehensif. Studi kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mengandung dimensi normatif, filosofis, dan sosial yang kuat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan-pendekatan utama dalam studi kebijakan pendidikan Islam serta relevansinya dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis melalui tahap pengumpulan, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan integratif yang mencakup pendekatan keagamaan, sosial, filosofis, epistemologis, dan pedagogis. Model-model kebijakan publik juga berperan penting dalam menjembatani nilai-nilai ideal Islam dengan realitas implementasi kebijakan. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan Islam yang efektif adalah kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, responsif terhadap dinamika sosial, serta mampu mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, dan moral dalam proses pendidikan.

Kata Kunci

kebijakan pendidikan Islam; pendekatan kebijakan; pendidikan Islam; studi kebijakan; nilai-nilai Islam

Pendahuluan

Studi kebijakan pendidikan Islam menuntut pendekatan multidimensional karena kebijakan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan peradaban umat. Dalam konteks negara modern, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai

sarana transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu dikaji secara mendalam agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Normatif dan ideologis. Sejumlah penelitian sebelumnya menekankan pentingnya pendekatan agama dan sosial dalam kebijakan pendidikan Islam, namun masih terbatas dalam mengintegrasikan landasan filosofis dan epistemologis secara komprehensif. Artikel ini menempatkan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pendekatan kebijakan pendidikan Islam secara integratif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan utama dalam studi kebijakan pendidikan Islam serta menganalisis relevansinya dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi secara mendalam kerangka kebijakan pendidikan Islam. Fokus utama dari desain penelitian ini adalah melakukan penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder, yang mencakup buku teks, artikel jurnal bereputasi, serta dokumen resmi terkait kebijakan pendidikan Islam. Penggunaan studi kepustakaan dipandang sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk melakukan refleksi kritis terhadap teks-teks kebijakan dan teori-teori pendidikan Islam yang sudah ada, guna memperoleh pemahaman konseptual yang kokoh mengenai pendekatan multidimensional dalam kebijakan publik.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-analitis yang melibatkan serangkaian tahapan sistematis dimulai dari pengumpulan data (*coding*), klasifikasi berdasarkan relevansi tema, hingga interpretasi mendalam terhadap teks yang dikaji. Peneliti melakukan sinkronisasi antara model kebijakan publik—seperti model yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan nilai-nilai normatif pendidikan Islam untuk menarik kesimpulan yang komprehensif. Melalui validasi data berbasis interpretasi teks yang

ketat, metode ini diharapkan mampu merumuskan kerangka integratif yang menghubungkan aspek filosofis, epistemologis, dan pedagogis dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa studi kebijakan pendidikan Islam menuntut penggunaan pendekatan yang bersifat multidimensional dan integratif. Pendidikan Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas pedagogis, melainkan sebagai bagian dari kebijakan publik yang dipengaruhi oleh faktor keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan publik dengan penekanan utama pada pendekatan keagamaan dan sosial yang dikombinasikan dengan perspektif akademis dan kontekstual. Dalam kerangka analisis kebijakan, model-model kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, seperti model deskriptif, normatif, verbal, simbolis, dan prosedural, terbukti relevan untuk menjelaskan dinamika kebijakan pendidikan Islam.

Model-model tersebut berfungsi tidak hanya untuk menggambarkan realitas kebijakan, tetapi juga untuk memprediksi dampak kebijakan serta merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Melalui penggunaan model ini, kebijakan pendidikan Islam dapat dianalisis secara sistematis dengan memperhatikan hubungan sebab-akibat dan asumsi dasar yang melatarbelakanginya. Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan filosofis dan epistemologis memiliki peran penting dalam memperkuat landasan kebijakan pendidikan Islam.

Pendekatan filosofis membantu menggali makna, tujuan, dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak kehilangan orientasi normatif dan etis. Sementara itu, pendekatan epistemologis menegaskan bahwa sumber pengetahuan dalam pendidikan Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan tetap membuka ruang dialog rasional dan ilmiah dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan pedagogis juga menjadi temuan penting dalam kajian ini.

Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik. Proses pembelajaran yang meneladani nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW, mengintegrasikan pengalaman, refleksi, dan pembelajaran kontekstual, dinilai mampu membentuk keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam yang efektif memerlukan sinergi antara lembaga pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat.

Pembahasan

Pendekatan dan Model Kebijakan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan bagian dari kebutuhan publik sehingga analisis kebijakannya menggunakan pendekatan publik, terutama pendekatan keagamaan dan sosial yang dipadukan dengan perspektif akademis, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam analisis kebijakan, digunakan berbagai model kebijakan sebagaimana dikemukakan William N. Dunn, seperti model deskriptif, normatif, verbal, simbolis, dan prosedural, yang berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan asumsi dan hubungan sebab-akibat tertentu.

Model-model ini bersifat representatif dan banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik, termasuk pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan Islam sendiri dikaji melalui pendekatan keagamaan, hukum, sosiologis, kebudayaan, dan sejarah guna memastikan tercapainya tujuan utama pendidikan Islam. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera, aman, dan bermartabat. (William N.Dunn, 2003)

Pendekatan keagamaan, pendekatan hukum, pendekatan sosiologis, pendekatan kebudayaan dan bahkan dengan pendekatan sejarah. Dayah dan Balai Pengajian sebagai lembaga pendidikan Islam, karena itu tujuannya juga tidak terlepas dari tujuan hidup manusia. Hal ini juga relevan dengan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 3)

Pendekatan Filosofis dan Epistemologis

Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam Studi Islam mencakup teks suci, sejarah, teologi, hukum, dan budaya, dengan pendekatan filosofis sebagai salah satu metode utama untuk analisis mendalam. Pendekatan ini mengeksplorasi konsep kunci Islam seperti akal (reason), aqidah, etika, hukum, dan nilai-nilai menggunakan metode filosofis, bukan sekadar filsafat Barat. Ia mendorong pertanyaan kritis tentang makna, tujuan, dan implikasi ajaran Islam, menekankan rasionalitas untuk menggali pemahaman agama, menafsirkan teks suci, serta dialog dengan filsafat, sains, dan budaya lain. Di era globalisasi, pendekatan ini merangsang pemikiran kritis dan relevansi Islam dalam kehidupan manusia. (Muhmidayeli, 2011)

Pendekatan Epistemologi dalam Pendidikan Islam Epistemologi, dari bahasa Yunani episteme (pengetahuan) dan logos (teori/ilmu sistematis), adalah teori tentang pengetahuan sumber, struktur, metode, validitas, batas, dan hakikatnya. Definisi ahli meliputi:

- D.W. Hamlyn: Cabang filsafat tentang hakikat, lingkup, dasar, dan keandalan pengetahuan.
- Dagobert D. Runes (via Mujamil Qomar): Membahas sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.
- Am Syaifudin: Menjawab pertanyaan tentang asal, sumber, hakikat, pembangunan, kebenaran, dan batas ilmu diringkas menjadi masalah sumber dan kebenaran ilmu. (Khobir, 2007)

Pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Epistemologi filsafat pendidikan Islam membahas cara memperoleh,

hakikat, dan sumber pengetahuan dalam konteks ini, termasuk proses, syarat, batas validitas, dan hakikat pendidikan Islam. (Ilham Akhmad, 2023)

Pendekatan Pedagogis

Pendekatan pedagogis dalam studi Islam berakar pada pengakuan potensi individu sebagai anugerah Allah SWT, yang dikembangkan melalui pendidikan sesuai ajaran agama, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan ilmu dan membaca untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Pendekatan ini menciptakan kesadaran peserta didik akan keberadaan Tuhan dan peran sebagai khalifah, melampaui pencapaian kognitif menuju pembentukan karakter akhlak mulia, sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak.

Proses pendidikan mengintegrasikan nilai moral dan etika dalam setiap aspek, dengan guru sebagai teladan yang sabar, penuh kasih, dan bijaksana seperti Rasulullah SAW, sehingga menumbuhkan interaksi positif dan suasana belajar kondusif di mana siswa merasa dihargai. Pendekatan ini juga menonjolkan pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi, didorong ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajak berpikir dari alam dan kehidupan sehari-hari, mendorong partisipasi aktif melalui diskusi, tanya jawab, serta eksperimen untuk membentuk life skills yang relevan dengan realitas.

Lebih lanjut, keseimbangan ilmu duniawi dan ukhrawi menjadi prinsip utama, di mana pendidikan tidak terbatas pada prestasi akademik atau karir, melainkan mempersiapkan kehidupan akhirat melalui nilai spiritual dan moral yang memberi manfaat sosial. Implementasi memerlukan kolaborasi orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan, sehingga pembelajaran holistik terjadi di kelas maupun kehidupan sehari-hari, menghasilkan individu intelektual bermoral yang siap dunia-akhirat. (Kompasiana 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Pendekatan keagamaan

dan sosial menjadi fondasi utama dalam analisis kebijakan, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan filosofis, epistemologis, dan pedagogis untuk memperkuat arah dan tujuan kebijakan pendidikan Islam. Model-model kebijakan publik memberikan kerangka analitis yang penting dalam memahami, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan pendidikan Islam secara sistematis.

Sementara itu, pendekatan filosofis dan epistemologis memastikan bahwa kebijakan tetap berlandaskan nilai, rasionalitas, dan sumber ajaran Islam. Pendekatan pedagogis menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya diukur dari aspek administratif dan akademik, tetapi juga dari keberhasilannya dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam yang dirumuskan dan diimplementasikan secara integratif diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sekaligus mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, sejahtera, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Referensi

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2022). Halal lifestyle: Current trends and future research directions. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 3(1), 15-32.
- Aiedah, A. K., & Suki, N. M. (2020). Halal food consumption and Islamic revivalism: Evidence from the Muslim middle class. *International Journal of Consumer Studies*, 44(4), 321-334.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Hassan, S. H., & Pandey, K. (2023). Beyond the label: The role of religiosity and social identity in halal brand loyalty. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 71, 103-118.

- Ilham, A. (2023). Epistemologi filsafat pendidikan Islam: Hakikat dan sumber pengetahuan. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 12(2), 145-160.
- Khobir. *Epistemologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kompasiana. (2024, December 18). *Pendekatan pedagogis Islam: Menyelaraskan kecerdasan intelektual dan moral*. Diakses pada 15 September 2025 dari <https://www.kompasiana.com/270128/67626280c925c40a862e72c6/pendekatan-pedagogis-islam-menyelaraskan-kecerdasan-intelektual-dan-moral>
- Kompasiana. "Pendekatan Pedagogis Islam: Menyelaraskan Kecerdasan Intelektual dan Moral." *Kompasiana*, December 18, 2024. Accessed September 15, 2025. <https://www.kompasiana.com/270128/67626280c925c40a862e72c6/pendekatan-pedagogis-islam-menyelaraskan-kecerdasan-intelektual-dan-moral>
- Mahrinasari, M. (2021). The influence of halal certification on public trust and purchasing decisions in Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 740-756.
- Muhmidayeli. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Munzirin, A. (2025). Dinamika Pendidikan Islam Tradisional pada Masa Kejayaan Andalusia. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 192-208.
- Qomar, Mujamil. *Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional hingga Metode Kritis*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Radiah, I. (2024). Pendekatan studi kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal An-Nur*, 10(1), 1-15.

- Rahma, C. D. (2025). Pendidikan Karakter Dalam Pai Yang Terpinggirkan Oleh Fokus Pada Hafalan. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 142-153.
- Rahman, D. M. (2025). Analisis Filsafat Posthumanisme dalam Konsep Khalifah Menurut Al-Qur'an. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 55-67.
- Ramadan, R. (2025). Membongkar Epistemologi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Konteks Postmodernisme. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 211-224.
- Scribd. "Makalah Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam Integratif." Accessed September 15, 2025. <https://id.scribd.com/document/676458944/makalah-pendekatan-filosofis>
- Sulaiman, Y., & Mas'od, A. (2025). Digitalization of halal certificates and its impact on Muslim consumer behavior in Southeast Asia. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 445-462.
- Syauky, A., & Silahuddin, S. (2026). Arah dan tujuan kebijakan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 10(01), 75-92.